

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Good Corporate Governance Theory*

Usaha untuk melembagakan *corporate governance* pertama kalinya dilakukan oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* (Komite Cadbury). *Cadbury Committee* (Komite Cadbury) bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama di banyak negara. Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Agoes,2013:101).

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum adalah sebagai berikut (Agoes,2013:103):

- a. Perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (*Fairness*), yaitu perlakuan yang adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan yang lainnya). Hal inilah yang memunculkan konsep *stakeholders* (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan *stockholders* (pemegang saham saja).
- b. Prinsip Transparansi (*Transparency*), disebut juga prinsip keterbukaan artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahaskan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.
- c. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu perlu adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
- d. Prinsip Tanggung jawab (*Responsibility*), adalah prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

2.1.1.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Beberapa manfaat penerapan *corporate governance* (Maksum, 2005 dalam Mirnayanti,2013) adalah :

- a. Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan atau organisasi akan mengalami peningkatan.
- b. *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan organisasi. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi organisasi maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
- c. Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada organisasi akan meningkat sehingga citra positif organisasi akan naik.
- d. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi yang transparan.

2.1.2 Persepsi

Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah katakarakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional.

(Kotler,1995;219)

2.1.2.1 Proses Terbentuknya Persepsi

Proses pembentukan persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima oleh indera manusia (*sensory receptor*) sebagai bentuk sensation. Sejumlah besar sensation yang diperoleh dari proses pertama diatas kemudian diseleksi dan diterima. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap.

Sensation yang diperoleh dari hasil penyaringan pada tahap kedua itu merupakan input bagi tahap ketiga, tahap pengorganisasian sensation. Dari tahap ini akan diperoleh sensation yang merupakan satu kesatuan yang lebih teratur dibandingkan dengan sensation yang sebelumnya. Tahap keempat merupakan tahap penginterpretasian seperti pengalaman, proses belajar, dan kepribadian. Apabila proses ini selesai dilalui, maka akan diperoleh hasil akhir berupa Persepsi.

2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi (Gaspersz ,1997;35):

1. Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.
2. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.
3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

2.1.3 Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik

kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

1. Relevan

Informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdapat beberapa unsur penting yang berguna bagi pengambilan keputusan berbagai pihak yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan. Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan benar, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, informasi disajikan sejara jujur serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu informasi menjadi bias atau tak berguna apabila informasi yang disajikan tersebut tidak tepat waktu. Ketepatanwaktuan berpengaruh terhadap kebermanfaatan informasi tersebut.

2.1.4 Keandalan (*Reliability*) dan Ketepatanwaktuan (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan yang andal yaitu laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketepatanwaktuan (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Indikator keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
2. Neraca disajikan.
3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan.
4. Catatan atas laporan keuangan disajikan
5. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.
6. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.
7. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Indikator ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.
2. Laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur, misal : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan (bila laporan jarang tersedia berikanlah tanda pada angka satu).
3. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur :

- a) Laporan realisasi semester pertama
- b) Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD
- c) Neraca
- d) Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.5 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Ukuran kapasitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Griffin, 2004 dalam Delanno, 2012) yaitu:

- a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapan pun didunia terdapat pendidikan.

- b. Pelatihan

Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya.

c. Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan memiliki pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan sesuatu pekerjaan, lebih terampil, punya wawasan yang luas dan mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Indikator kapasitas sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah cukup
2. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas
3. Memiliki peran dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam peraturan daerah
4. Memiliki uraian tugas yang sesuai dengan fungsi akuntansi
5. Memiliki pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi
6. Melaksanakan proses akuntansi
7. Mengadakan pelatihan pengembangan keahlian
8. Menganggarkan dana-dana untuk sumber daya, peralatan dan pelatihan

2.1.6 Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data (memperoleh, menyimpan, memproses) untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*),

electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya

- a. pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).

Indikator pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Memiliki perangkat komputer
2. Memiliki dan memanfaatkan jaringan internet
3. Mengadakan proses akuntansi yang terkomputerisasi
4. Menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Adanya laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
6. Adanya pemeliharaan peralatan
7. Adanya perbaikan peralatan yang rusak/usang

2.1.7 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Indikator sistem pengendalian intern yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sub bagian keuangan/akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi yang meliputi :
 - a) Prosedur akuntansi penerimaan kas
 - b) Prosedur akuntansi pengeluaran kas
 - c) Prosedur akuntansi aset
 - d) Prosedur akuntansi selain kas
2. Daftar rekening (*chart of account*) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.
3. Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang

4. Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
5. Setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi.
6. Catatan akuntansi dijaga untuk tetap tepat waktu.
7. Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan.
8. Sistem akuntansi yang ada memungkinkan audit/*transaction trail*.
9. Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.

2.1.7 Komitmen Organisasi

Menurut Allen dan Meyer (1990) komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen yaitu: komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen kontinuans (*continuance commitment*), dan komitmen normative (*normative commitment*).

- **Komitmen afektif**

Komitmen afektif mengarah pada *the employee's emotional attachment to, identification with, and involvement in the organization*. Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan dan keterlibatan karyawan pada organisasi.

- **Komitmen kontinuans**

Komitmen Kuntuans berkaitan dengan *an awareness of the costs associated with leaving the organization*. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan

untung rugi dalam diri karyawan berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi.

komitmen kontinuans adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (*need to*) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain.

- Komitmen normatif merefleksikan *a feeling of obligation to continue employment*. Dengan kata lain, komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib (*ought to*) bertahan dalam organisasi.

2.1.7.1 Faktor Penyebab Komitmen Organisasi

Faktor penyebab komitmen organisasi menurut Allen & Meyer (1990) antara lain:

1. Penyebab komitmen afektif terdiri dari: karakteristik pribadi, karakteristik jabatan, pengalaman kerja, serta karakteristik struktural. Karakteristik struktural meliputi besarnya organisasi, kehadiran serikat kerja, luasnya kontrol, dan sentralisasi otoritas.

2. Penyebab komitmen kontinuans terdiri dari besarnya dan/atau jumlah investasi atau taruhan sampingan individu, dan persepsi atas kurangnya alternatif pekerjaan lain.
3. Penyebab komitmen normatif terdiri dari pengalaman individu sebelum masuk ke dalam organisasi (pengalaman dalam keluarga atau sosialisasi budaya) serta pengalaman sosialisasi selama berada dalam organisasi.

Indikator komitmen organisasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Mengetahui tentang visi dan misi organisasi
2. Memiliki loyalitas terhadap organisasi
3. Keterlibatan dalam pekerjaan
4. Adanya usaha yang maksimal dalam pekerjaan
5. Mengetahui tentang tujuan dan sasaran pekerjaan
6. Pengetahuan tentang pekerjaan utama

2.2 Penelitian Terdahulu

Indriasari dan Nahartyo (2008) meneliti tentang “Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)” Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumberdaya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Harifan (2009) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Dengan variabel independen antara lain Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi, sedangkan variabel dependen adalah Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) meneliti “Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variable intervening pengendalian intern akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)” Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan hasil penelitian SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif.

Zuliarti (2012) meneliti tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus)” Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini adalah Kapasitas SDM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan teknologi informasi dan Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Kapasitas SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Delanno (2012) tentang pengaruh pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh hasil variabel eksogen dan intervening berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, pemanfaatan

teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Ariesta (2013) meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat)” dengan hasil penelitian yaitu Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan serta pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

yosefrinaldi (2013) meneliti tentang “Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variable intervening pengendalian intern pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)” Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern pemerintah, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mirnayanti (2013) meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat)” dengan hasil penelitian yaitu

Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. pengendalian intern akuntansi memiliki berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil penelitian
1	Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo	2008	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas SDM. memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2	Harifan	2009	Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknolgi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan	Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai

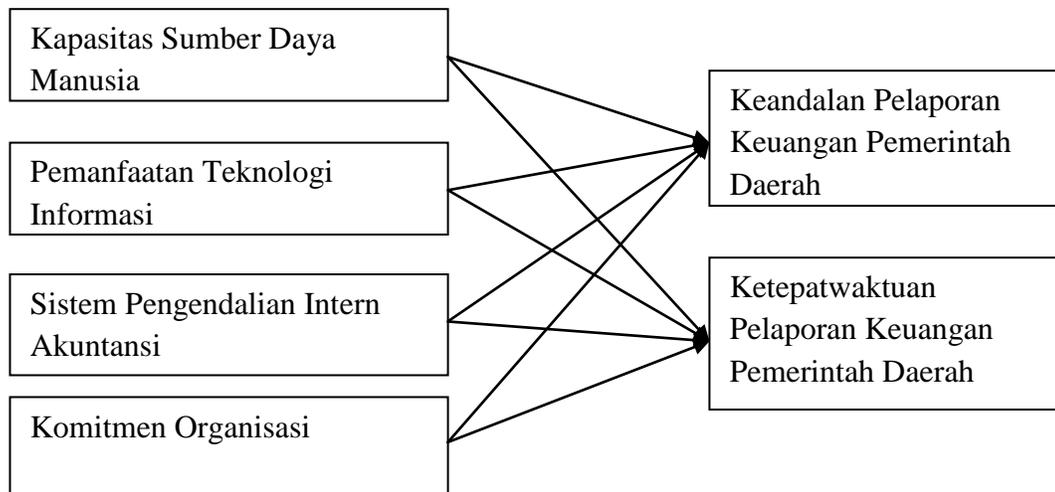
			Keuangan Pemerintah Daerah	Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3	Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati	2010	Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosrate)	SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif.
4	Zuliarti	2012	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus)	Kapasitas SDM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan teknologi informasi dan Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Kapasitas SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap

				ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.
5	Fadila Ariesta	2013	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)	Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan serta pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.
6	Galuh Fajar Delanno dan Deviani	2013	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan pengendalian intern akuntansi serta Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemda.
7	Yosefrinaldi	2013	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variable intervening pengendalian intern	Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

			pemerintah(Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)	
8	Mirnayanti	2013	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat)	Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. pengendalian intern akuntansi memiliki berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

2.3 Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Komitmen Organisasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan yang berperan dalam menghasilkan informasi. Dalam menghasilkan informasi yang memiliki nilai tentu saja sumber daya manusia yang dimiliki haruslah sumber daya manusia yang memiliki keterampilan serta latar belakang pendidikan dibidang ekonomi akuntansi agar informasi yang dihasilkan tersebut sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, bebas dari kesalahan baik yang material maupun non material dan terhindar dari kecurangan

baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sumber daya manusia yang berkapasitas tinggi tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikannya namun juga dapat dilihat dari pelatihan-pelatihan yang diikuti dan pengalaman dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Jika seorang sumber daya manusia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berkorelasi dengan pekerjaannya tidak dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia tersebut tidak memiliki kompetensi, karena kapasitas dari sumber daya manusia bukan hanya diukur dari latar belakang pendidikan namun juga melalui pelatihan dan pengalaman. Semakin tinggi nya kapasitas sumber daya manusia memungkinkan menghasilkan pelaporan keuangan daerah yang andal dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H_{1a} : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H_{1b} : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Semakin berkembangnya teknologi informasi memungkinkan para pengguna lebih mudah dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi keuangan secara cepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi ini pula memicu pemrosesan informasi secara cepat. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah yang memiliki transaksi yang kompleks sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan agar informasi keuangan yang dimiliki dapat dengan cepat dan akurat dikelola dan dapat diakses tepat waktu dan andal. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H_{2a} : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H_{2b} : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.4.3 Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam sistem pengendalian intern ditetapkan prosedur pengendalian untuk menstandarisasi proses kerja meliputi personel yang kompeten yaitu sumber daya manusia yang akan menjalankan pengendalian intern tersebut, pelimpahan tanggung jawab, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait dan pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan asset dan operasional. Melalui prosedur pengendalian tersebut diharapkan tercapainya tujuan organisasi dan dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Tujuan dari organisasi yaitu melaksanakan amanat masyarakat dengan baik serta menyajikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern akuntansi dengan keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

H_{3a} : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H_{3b} : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.4.4 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen organisasi merupakan suatu perilaku sumber daya manusia selaku pegawai disebuah organisasi yang berkaitan dengan loyalitas, keterlibatan dengan organisasi, usaha maksimal dalam melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Jika sumber daya manusia memiliki komitmen organisasi yang tinggi diharapkan dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Dengan mengetahui tentang visi misi organisasi, dan tujuan dari sasaran pekerjaan dapat mengarahkan pegawai untuk bekerja dengan lebih baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan dari organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara komitmen organisasi dengan keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

H_{4a} : Komitmen organisai berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H_{4b} : Komitmen organisai berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah